



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja, Telepon : (0362) 21843

SINGARAJA

Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>, Email: disperkimta@buleleng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 100/140.3/II/2021

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54941);
 3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
 6. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2014 Tentang Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;

gaf
5/2 2021

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman, Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020 – 2024; dan
12. Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Nomor 800.5/140.2/II/2021 Tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021

KESATU : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tersebut merupakan landasan kerja Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 20 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Nr Nyoman Surattini, ST.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP.19670102 199603 2 003

**RENCANA AKSI (RENCANA KERJA) REFORMASI BIROKRASI
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
 TAHUN 2020-2024**

NO	Program/Digitalisasi	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung-jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
			4	5	6	7	8	9				10	11	12												
I Program: Manajemen Perubahan Organisasi Sasaran: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RB - Meningkatkan komitmen pegawai terhadap RB																										
1	Pengelolaan Tim Reformasi Birokrasi	Persentase capaian Rencana Aksi RB Disperkimta Kab. Buleleng (jumlah = jumlah indikator yang tercapainya/jumlah seluruh indikator X 100%)	70%	75%	80%	82%	85%	Kebid. Umum dan Keuangan	Membentuk atau memperbaharui Tim RB Disperkimta Kab. Buleleng	Surat penunjukan Tim RB Disperkimta Kab. Buleleng																
		Persentase jumlah pegawai Disperkimta yang mengikuti sosialisasi dan memahami implementasi RB (jumlah = jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi/jumlah seluruh pegawai Disperkimta X 100%)	70%	80%	82%	85%	90%		Melaksanakan sosialisasi implementasi RB dan Survey Penubarsan RB kepada seluruh pegawai Disperkimta Kab. Buleleng	Daftar peserta sosialisasi implementasi RB dan hasil survey penubarsan RB pegawai di Lingkungan Disperkimta Kab. Buleleng																
		Persentase capaian Rencana Aksi RB Disperkimta Kab. Buleleng (jumlah = rata-rata skor X bobot RB)	88%	70%	82%	85%	90%		Melaksanakan evaluasi rencana aksi RB Melaksanakan pembaruan atau pemeliharaan rencana aksi RB dengan kualitas RB Kab. Buleleng Membentuk atau memperbaharui Tim Asesor PMPRB Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen hasil evaluasi, rekomendasi dan tindak lanjut rencana aksi RB Dokumen rencana aksi RB di lingkungan Kab. Buleleng yang telah diperbaharui SK Tim Asesor Disperkimta Kab. Buleleng																
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terbentuknya Tim Asesor yang representatif dan terlatih (jumlah = jumlah asesor/jumlah asesor yang di perlukan X 100%)	80	12	80	80	85	Kebid. Umum dan Keuangan																		
		Nilai skor pemenuhan (total nilai unsur pemenuhan)	9,34	12,5	11,5	12,5	13		Tim Asesor melaksanakan identifikasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB Disperkimta Kab. Buleleng	Fom LKE PMPRB																
3	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Persentase jumlah Agen Perubahan di Disperkimta Kab. Buleleng	5%	8%	12%	20%	25%	Kebid. Umum dan Keuangan	Memperbaharui Agen Perubahan Disperkimta Kab. Buleleng	SK Kepala Dinas tentang Agen Perubahan Disperkimta Kab. Buleleng																
		Persentase jumlah pegawai Disperkimta yang mengikuti sosialisasi budaya kerja (jumlah = jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi budaya kerja/jumlah seluruh pegawai X 100%)	80	85	90	85	100		Agan Perubahan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan pelayanan prima	Dokumen sosialisasi dan internalisasi budaya kerja dan pelayanan prima																
		Persentase jumlah pegawai Disperkimta Kab. Buleleng yang memahami budaya kerja (jumlah = jumlah pegawai yang memahami budaya kerja/jumlah seluruh pegawai X 100%)	80	85	90	85	100		Melaksanakan peningkatan kapasitas Agen Perubahan Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen peningkatan kapasitas Agen Perubahan Disperkimta Kab. Buleleng																
		Memperbaharui rencana aksi Agen Perubahan Disperkimta Kab. Buleleng	Dokumen rencana aksi Agen Perubahan Disperkimta Kab. Buleleng																							
II Program: PENYATUAN PERATURAN PERLINDUNG-LINDANGAN Sasaran: meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan																										
1	Penyusunan kebijakan	Persentase penyusunan Peraturan/Keputusan Bupati dalam mengadopsi kebijakan di Disperkimta Kab. Buleleng	80%	85%	90%	95%	100%	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman	Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron	Dokumen identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron																
		Persentase rancangan Peraturan Bupati (jumlah = jumlah rancangan yang terbit/jumlah rancangan yang diajukan)	100%	100%	100%	100%	100%		Menyusul kebijakan yang tidak harmonis/sinkron	Dokumen revisi kebijakan yang tidak harmonis/sinkron																
III Program: PENYATUAN DAN PENGUATAN ORGANISASI Sasaran: meningkatkan organisasi Pemerintah Provinsi Bali tepat fungsi dan ukuran																										

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Pemangung Jawab	Aktivitas/Tahapan-tahapan	Output	2025																									
			4	5	6	7	8	Jan				Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Ok	Nov	Des															
1	Evaluasi Kelembagaan	Skor evaluasi kelembagaan Disperkita (Permenpan 22/2018)							Kepala Sekel Penyelidikan Perencanaan Negara, Khusus, Citra dan Komral	Melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permenpan 22/2018, berfokus terhadap evaluasi kelembagaan : - Perencanaan - Pelaksanaan Pengumpulan Data - Pengolahan dan Analisis Data - Laporan Evaluasi	Laporan evaluasi kelembagaan Permenpan 22/2018																										
		Tingkat kematangan Disperkita sesuai permendagri no. 99/2018								Melaksanakan evaluasi kelembagaan sesuai dengan Permendagri 99/2018 (11 indikator) : - Perencanaan - Monitoring dan pengendalian - Pelayanan mutu layanan - SOP - Pendidikan dan pelatihan - Analisis kebijakan dan pemecahan masalah - Manajemen sumber daya yang terukur - Manajemen risiko - Penguatan kinerja - Pengembangan inovasi layanan - Budaya organisasi	Laporan evaluasi kelembagaan Permendagri 99/2018																										
2	Pembentukan kelembagaan berbasis kinerja	Persentase penyelesaian kelembagaan berbasis kinerja (Kuantitas/nilai urusan kelembagaan berdasarkan proses bisnis dan pokok kinerja/jumlah urusan kelembagaan)	20%	33%	50%	50%	60%		Memproses penyelesaian kelembagaan berdasarkan standar yang berlaku	Rekomendasi Kelembagaan																											
									Memproses penyelesaian kelembagaan sesuai dengan proses bisnis	Rekomendasi Kelembagaan																											
									Memproses penyelesaian kelembagaan dengan memprioritaskan kinerja utama	Rekomendasi Kelembagaan																											
IV PROGRAM PENCAPAIAN TATAUSAHA Sasaran: - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kerja dan operasional Disperkita Kab. Buleleng - Meningkatkan kualitas pengelolaan SPBE yang terintegrasi - Meningkatkan kualitas pelayanan Keterbukaan Informasi Publik - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset - Meningkatkan pengendalian pengadaan barang/jasa																																					
1	Penetapan Prosidur bisnis dan SOP	Persentase Peta Proses Bisnis Disperkita Kab. Buleleng yang sesuai dengan prosedur atau kebijakan yang berlaku	85%	90%	100%	100%	100%	Kab. Perencanaan	Menyusun/mengupdate peta proses bisnis Disperkita Kab. Buleleng	Peta Proses Bisnis Disperkita Kab. Buleleng																											
			Persentase SOP Disperkita Kab. Buleleng sesuai dengan Peta Proses Bisnis	85%	90%	100%	100%		100%	Menyusun dan memperbaiki SOP sesuai dengan Peta Proses Bisnis dan peraturan yang berlaku	SOP Disperkita Kab. Buleleng yang sesuai dengan Peta Proses Bisnis dan peraturan yang berlaku																										
			Persentase penempatan SOP Disperkita Kab. Buleleng	85%	90%	100%	100%		100%	Melakukan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Peta Proses Bisnis dan SOP Disperkita Kab. Buleleng	Dokumen sosialisasi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Peta Proses Bisnis dan SOP Disperkita Kab. Buleleng																										
2	Penerapan E-Government	Persentase penerapan aplikasi yang digunakan Disperkita Kab. Buleleng	75%	80%	85%	90%	90%		Membentuk Tim Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik (SPBE) Disperkita Kab. Buleleng	36 Tim SPBE Disperkita Kab. Buleleng																											
									Meyajarin Roadmap dan Rencana Aksi pelaksanaan SPBE Disperkita Kab. Buleleng	Roadmap dan Rencana Aksi SPBE Disperkita Kab. Buleleng																											
									Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi penerapan Roadmap dan Rencana Aksi SPBE kepada seluruh pegawai Disperkita Kab. Buleleng	Laporan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi penerapan Roadmap dan Rencana Aksi pelaksanaan SPBE kepada seluruh pegawai Disperkita Kab. Buleleng																											
		Persentase terintegrasinya aplikasi yang dikelola pada Disperkita Kab. Buleleng	20%	25%	30%	35%	40%		Mengprofil SPBE Disperkita Kab. Buleleng	Dokumen pengelolaan SPBE Disperkita Kab. Buleleng																											
									Melaksanakan pengintegrasian sistem dan aplikasi yang dikelola oleh Disperkita Kab. Buleleng	Dokumen pengintegrasian sistem dan aplikasi yang dikelola oleh Disperkita Kab. Buleleng																											

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Perencana (jabat)	Wahibay/Tahapan tahunan	Output	Tahun																							
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
3	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Dokumen Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan/diformasikan Diaperiknta Kab. Buleleng	70%	75%	75%	80%	80%		Menetapkan Dokumen Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan/diformasikan Diaperiknta Kab. Buleleng	SK Kepala Dinas Periknta tentang Penerapan Dokumen Informasi Publik yang dipublikasikan/diformasikan oleh Diaperiknta Kab. Buleleng																								
		Persentase pemahaman informasi yang diinstitusikan Diaperiknta Kab. Buleleng	100%	100%	100%	100%	100%		Menyusun SOP tentang penerapan Keterbukaan Informasi Publik Diaperiknta Kab. Buleleng	Dokumen SOP tentang penerapan Keterbukaan Informasi Publik Diaperiknta Kab. Buleleng																								
		Persentase penginta informasi yang dapat diakses	100%	100%	100%	100%	100%		Menyusun pedoman penyelesaian penginta informasi publik Diaperiknta Kab. Buleleng	Dokumen pedoman penyelesaian penginta informasi publik Diaperiknta Kab. Buleleng																								
4	Pengelolaan Anggaran yang berkualitas	Perilaku kearsipan Diaperiknta Kab. Buleleng	50%	55%	60%	70%	75%		Menetapkan atau memperbaharui tim pengelola kearsipan Diaperiknta Kab. Buleleng	SK Tim Pengelola Kearsipan Diaperiknta Kab. Buleleng																								
									Mengajukan rencana kerja dan melaksanakan pelaksanaan kearsipan Diaperiknta Kab. Buleleng	Dokumen rencana kerja dan pengelolaan kearsipan Diaperiknta Kab. Buleleng																								
									Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kearsipan Diaperiknta Kab. Buleleng	Dokumen hasil monitoring pelaksanaan kearsipan Diaperiknta Kab. Buleleng																								
5	Kualitas Pengadaan Barang Jasa	Persentase pengadaan secara elektronik di Diaperiknta Kab. Buleleng	30%	300%	100%	300%	300%		Monev aplikasi dan memperbaharui sam ber daya memala pengadaan Diaperiknta Kab. Buleleng	Laporan pengadaan secara elektronik																								
									Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SOM Perencanaan Diaperiknta Kab. Buleleng	Dokumen peningkatan kapasitas dan kapabilitas SOM Perencanaan Diaperiknta Kab. Buleleng																								
V. PROGRAM PENYALAMAN SISTEM MANAJEMEN SDM berujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan benefit/jalan karir kesejahteraan yang seadil.																																		
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Perentase Diaperiknta Kab. Buleleng yang memiliki pegawai sesuai dengan perbandingan kebutuhan pegawai (rumus = (jumlah formasi/pekerja) (RMB X 100%)	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Sekel Fasilitas Pengadaan Tanah	Menyusun atau memperbaharui Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen Analisis Jabat																								
		Perentase jumlah formasi yang dialokasikan untuk pemerintah (jumlah pegawai yang pendaftar (rumus = (jumlah formasi/pekerja)(RMB X 100%)	50%	50%	10%	15%	25%		Melaksanakan perbandingan kebutuhan pegawai berdasarkan Peta Jabatan	Dokumen Peta Jabatan																								
2	Penerimaan Pegawai (Tenaga Fasilitas Kelengkapan)	Perentase jumlah formasi yang dipelakan	100%	100%	100%	100%	100%		Mengajukan proposal kebutuhan 5 tahun	Dokumen proposal kebutuhan 5 tahun																								
									Menghitung formasi jabatan	Dokumen formasi jabatan																								
									Mempersiapkan penarikan pegawai secara keadilan masyarakat	Pengumuman penarikan																								
									Melaksanakan pendaftaran secara online	Dokumen pendaftaran																								
									Melaksanakan proses seleksi	Dokumen proses seleksi																								
									Pengumuman hasil seleksi dan pemanggilan secara tertulis	Pengumuman hasil seleksi																								
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Perentase pegawai yang telah di assessment (jumlah peserta assessment/jumlah pns X 100%)							Menyusun/mengupdate SKI	SKI																								
			Gap kompetensi pegawai (jumlah = GAR/jumlah PNS x 100%)							Mengukur kompetensi pegawai berdasarkan SKI	Hasil Evaluasi Kompetensi Pegawai																							
			Perentase pegawai yang mengikut diklat berbasis kompetensi (jumlah = jumlah peserta diklat/jumlah seluruh pns X 100%)							Menghitung gap kompetensi	Gap Kompetensi																							
			Perentase pegawai dengan hasil diklat baik							Menyusun/mengupdate data kompetensi pegawai	Data Kompetensi Pegawai																							
										Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Dokumen analisis kebutuhan diklat kompetensi																							
							Menyusun kebijakan coaching dan mentoring	Revisi kebijakan coaching dan mentoring																										

NO	Program/Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung-jawab	Aktivitas/Talangan-talapan	Output	Bulan														
											Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Juli	Agus	Sep	Ok	Nov	Des			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
4	Peningkatan kinerja individu	Persentase pegawai yang sudah menetapkan sasaran kerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%		Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan program dengan kompetensi	Laporan monitoring kegiatan pengembangan pegawai															
		Persentase pegawai yang sudah mengukur MP secara berkala	100%	100%	100%	100%	100%		Mengukur MP	Data SKP Diaperkinta															
		Rasio kemitraan capaian kinerja terhadap penghitungan targetan kinerja			70%	70%	70%		Mengukur kinerja individu secara periodik	Realisasi PK Kinerja															
5	Peningkatan disiplin di diplo/kode etik/kode perilaku pegawai	Persentase pemenuhan pelanggaran disiplin pegawai (jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi jumlah pelanggaran tahun ini) ke media sosial dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	10%	10%	10%	10%	10%		Melakukan monitoring dan pengawasan kinerja individu	Laporan monitoring															
		Persentase pegawai yang diberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%		Menetapkan kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Daftar kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku															
		Mendokumentasikan pelaksanaan kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku	Laporan pemantauan disiplin/kode etik/kode perilaku																						
5	Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase data kepegawaian yang masukin pada aplikasi Sinyal	100%	100%	100%	100%	100%		Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi															
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi																						
		Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi																						
6	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	Persentase pelaksanaan evaluasi jabatan yang terdapat	80%	70%	80%	80%	90%		Mengelola penugasan sistem informasi kepegawaian di diplo/kode etik/kode perilaku	Data Sinyal yang masukin															
		Mengelola informasi faktor jabatan	Informasi faktor jabatan																						
		Mengelola basis data nilai jabatan	Nilai dan nilai jabatan																						
		Melaksanakan evaluasi berdasarkan SKJ	Hasil Evaluasi																						
VI. Program PENGUATAN AKUNTABILITAS Berwujud untuk meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja																									
1	Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan dokumen perencanaan	Persentase keterlibatan unsur Biretra Diaperkinta dengan RPMB (jumlah program reaktif yang sesuai/jumlah program RPMB & 3000)						Kepala Sekeloa, Pembinaan, Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan	Mengikuti Biretra dengan melibatkan pimpinan	DE Tim Perencanaan Biretra, dokumentasi keterlibatan pimpinan															
		Persentase pelaporan kinerja Diaperkinta yang sesuai dengan rencana							Melakukan pengumpulan pelaporan kinerja	Dokumen Pelaporan Kinerja Diaperkinta															
		Nilai reaktif RPMB Diaperkinta							Menyusun RPMB melibatkan pimpinan	RPMB, nilai 3000															
2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase pegawai yg memiliki PK Individu baik		75%	80%	85%	90%		Melakukan rekrutmen pegawai dan capaian PK secara berkala	Realisasi PK															
		Persentase pencapaian PK Diaperkinta secara berkala dan tepat waktu		75%	80%	85%	90%		Melakukan pemantauan dan kinerja dilakukan secara berkala ke dalam aplikasi	Dokumentasi pencapaian pada E-SKIP															

NO	Program/Regulasi	Indikator	2018	2019	2020	2021	2024	Penanggung- jawab	Aktivitas/Takapan-tahapan	Output	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
			4	5	6	7	8				12													
	2	Jumlah aplikasi pengkajian kinerja yang berimplikasi dengan baik	1	1	1	1	1		Melakukan pemutakhiran data kinerja diluarak secara berkala Mengeploit data kinerja ke aplikasi	- Data PB - Data Realisasi PB Data Kinerja														
VI Program: Penguatan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN																								
1	Gratifikasi	Persentase laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Kepala Sekel Perencanaan dan Penyelidikan Jangka Pertengahan	Melaksanakan public campaign anti gratifikasi	- Dokumentasi public campaign - Laporan public campaign														
		Persentase yang telah melaporkan UMKP	100%	100%	100%	100%	100%		Mengimplementasikan penanganan gratifikasi	SOP dan mekanisme gratifikasi														
		Persentase PMS yang telah melaporkan UMKP	71%	100%	100%	100%	100%		Melakukan kegiatan gratifikasi kepada UPD Kabupaten	Laporan gratifikasi team bulannya														
		Persentase pegawai Dipertimta yang memahami tentang gratifikasi	71%	40%	81%	90%	93%		Mengavaluasi kebijakan penanganan gratifikasi	Laporan evaluasi penanganan gratifikasi														
									Melaksanakan Hasil evaluasi atau penanganan															
									Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Kepala Negara (LHPK)	Data UMKP														
									Mengajukan Laporan Hasil Pemeriksaan Aparatur Sipil Negara (LHPASN)	Data LHPASN														
									Menyusun Tim SPP Dipertimta	SK Tim SPP														
2	Penetapan SPP	Persentase Penerapan SPP di Dipertimta Kab. Buleleng	72%	70%	80%	82%	86%		Penyusunan penilaian risiko	Buku Register														
									Pemilihan SPP	Laporan pemilihan SPP														
									Melaku Penetapan SPP	Laporan choice SPP														
3	Penanganan Pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%		Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	SOP dan mekanisme penanganan pengaduan														
									Mengelola jumlah pengaduan masyarakat dan meredukasinya	Rincian Pengaduan Masyarakat														
									Melakukan evaluasi atas sistem penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi sistem penanganan pengaduan masyarakat														
									Melaksanakan sosialisasi tentang WBS	Dokumentasi sosialisasi														
4	Whistle-Blowing System (WBS)	Persentase pengetahuan pegawai Dipertimta terkait WBS	100%	100%	100%	100%	100%		Mengidentifikasi Bermana Kepentingan	Matrix Bermana Kepentingan														
		Persentase pemahaman/pengertian k pegawai Dipertimta terkait dengan Bermana Kepentingan	75%	80%	85%	90%	95%		Sosialisasi Penanganan Bermana Kepentingan	Laporan sosialisasi penanganan bermana kepentingan														
									Implementasi Penanganan Bermana Kepentingan	SOP dan mekanisme														
									Mengelola jumlah pengaduan Bermana Kepentingan dan mereduksinya	Raportasi pengaduan bermana kepentingan														
									Mengavaluasi atas sistem Penanganan Bermana Kepentingan	Laporan money sistem penanganan bermana kepentingan														
									Melaksanakan Hasil evaluasi atas sistem Penanganan Bermana Kepentingan															
5	Pembangunan Zona Integritas	Persentase pegawai Dipertimta yang memahami/mengetahui Zona Integritas	50%	50%	60%	60%	75%		Membentuk sosialisasi tentang zona integritas	Dokumentasi sosialisasi														
									Melakukan pembangunan zona integritas secara intensif	Laporan pembangunan ZI														
VII Program: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.																								

NO	Program/ Kegiatan	Indikator	Tahun					Penanggung- jawab	Materi/Tatapapan/Referensi	Output	Bulan																												
			2009	2011	2012	2013	2014				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Oktr	Nov	Dek																	
1	1	1	1	1	1	1	1	Bupati Setan Pembinaan Ruman Swadaya	30	11																													
1	Stansi Pelayanan	Pelayanan Standar Pelayanan Terhadap Masyarakat Buleleng	60%	70%	80%	90%	100%		1. Meningkatkan kemampuan staf dalam pelayanan dan kepuasan	Output Standar Pelayanan																													
2	Budaya Pelayanan Prima	Pelayanan prima yang ramah tentang budaya pelayanan prima	70%	80%	90%	90%	95%		2. Melakukan pelatihan secara berkala dan terencana 3. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan 5. Melakukan komunikasi dan koordinasi 6. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	Output Dokumentasi pelatihan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan terhadap pelayanan prima Laporan pembinaan budaya pelayanan prima																													
		Pelayanan prima yang ramah tentang budaya pelayanan prima	80%	85%	90%	95%	100%		7. Melakukan pembinaan dan pengawasan 8. Melakukan komunikasi dan koordinasi 9. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	Output Laporan pembinaan																													
		Pelayanan prima yang ramah tentang budaya pelayanan prima	85%	90%	95%	100%	100%		10. Melakukan pembinaan dan pengawasan 11. Melakukan komunikasi dan koordinasi 12. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	Output Laporan pembinaan																													
		Pelayanan prima yang ramah tentang budaya pelayanan prima	90%	95%	100%	100%	100%		13. Melakukan pembinaan dan pengawasan 14. Melakukan komunikasi dan koordinasi 15. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	Output Laporan pembinaan																													
3	Kelembagaan Pelayanan	Lama dan kualitas Survey Kepuasan Masyarakat	80	75	100	120	150		16. Melakukan pembinaan dan pengawasan 17. Melakukan komunikasi dan koordinasi 18. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	Output Kelembagaan pelayanan																													
		Pelayanan Prima yang ramah tentang budaya pelayanan prima	80%	85%	90%	95%	100%	19. Melakukan pembinaan dan pengawasan 20. Melakukan komunikasi dan koordinasi 21. Melakukan koordinasi dengan instansi lain	Output Kelembagaan pelayanan																														

